DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi, Jakarta*: Sinar Grafika.

Andi Chaerul Akbar, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Aparatur Sipil Negara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif*, Makassar:Nas Media Pustaka.

Aminuddin Ilmar, 2020, *Hukum Administrasi Pemerintahan*,Makassar:Phinatama Media.

Aminuddin Ilmar, 2013*,Hukum Tata Pemerintahan*,Makassar: Identittas Universitas Hasanuddin.

Amelia Cahyani,Zainal Muttaqin,Anindya Saraswati Ardiwinata, 2023, *Hukum Pengawasan*, Bandung:PT.remaja Rosdakarya.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori,Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta Timur:Sinar Grafika

Arini Nur Annisa, 2023, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Teori, Konsep, dan Pengujian*.,Gowa:Subaltern Inti Media.

Arini Nur Annisa, Marwati Riza, 2025, *Hukum Pelayanan Publik,*Jakarta:Kencana.

Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia,* Yogyakarta:RangkangEducation & puKAP-Indonesia.

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Logika Hukum*, Jakarta:Kencana.

Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Kencana.

Irwansyah, Ahsan Yunus., 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta:Mitra Buana Media.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.

Mustakim, 2023,*Pokok-Pokok Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta:Kencana

Ridwan HR,2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok:PT.RajaGrafindo Persada.

Syahruddin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris*,Makassar:Umitiha Ukhuwah Grafika.

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2021, *Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung:Keni Media.

Yusnani Hasyimzoem, et al., 2017,*Hukum Pemerintahan Daerah,*Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Jurnal

A'an Efendi dan Sudarsono, 2024, *Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya,* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 53 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Abdurahman Jusuf, 2024, *Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama*,Jurnal Ekonomi Manajemen dan Ilmu Sosial Politik, Volume 1 Nomor 3,STIA Bina Taruna.

Abdul Razak, Zulkifli Aaspan, 2024, *Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Dinamika Penyelenggara Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Prosiding APHTN-HAN, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin.

Andi Asmawati AR, et al., 2021, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Sosial Politika, Volume 2 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Muh. Ramadhansyah Prasetia, Muhammad Fitra Rahman, 2024, *Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN, Volume 2 Nomor 1,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Cholida Hanum, 2020, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Jurnal Humani, Volume 10 Nomor 2,Fakultas Syariah IAIN Salatiga Indonesia.

Dalila Putri Joana, Yanuar Yoga Prasetyawan, 2023, *Analisis Pengelolaan Arsip DInamis Aktif Surat Perintah Tugas (SPT) di Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*, Undip E-Journal, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Hlm. 2.

Firdaus Arifin, 2021, *Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Litigasi, Volume 22 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Hairan, et.al., 2024, *Aspek Hukum dan Rasio Kebutuhan Jumlah Satpol PP Sebagai PPNS Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi di Kabupaten Kutaai Kartanegara),*Jurnal Proceeding APHTN-HAN, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Indah Sari, 2025, *Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Studi Eksploratif di Indonesia, Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,* Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Vicky Rahadyanto Widyatmoko, et al., *Analisis Pelaksanaan Disiplin ASN Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu,* IJurnal Riset dan Konseptual, Volume 10 Nomor 1, Magister Administrasi, Universitas Islam Malang.

Vivi Nilasari, Aldri Frinaldi, Roberia, 2025, *Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia, Volume 7 Nomor 1, Magister Ilmu Administrasi Publik UNP.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Dita Putri Karunia, 2023, *Pengaruh Konflik Peran dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Melalui Work Life Balance Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan PT. Bringin Karya Sejahtera*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta.

Donito Meha, 2022, *Peranan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tapanuli Tengah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Fajar Kurnia, 2020, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hutri Moni Pabeo, 2021, *Penegakan Paasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Jayadih, 2020, *Problematika Masyarakat Terhadap Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Study Kasus Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007)*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Lulu Anugrawati, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertibaan Pengemis di Kota Makassar*,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Septi Listiani, 2020, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Stefanus Satria Yuniar Santoso, 2025, *Pelindungan Hukum Bagi Dokter Polri Dalam Penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Tesis, Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang jam kerja dan hari kerja di dalam Kemenpan-RB

Wawancara

Wawancara bersama Andi Asman Sulaiman, selaku Bupati Bone

Wawancara bersama Edy Saputra Syam, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Bone

Wawancara bersama Baharuddin, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Wawancara bersama Muzakkir, selaku PPNS dan Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Wawancara bersama A. Arwin. selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Wawancara bersama Andi Dedy Astaman Hamsah, selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Wawancara bersama A. Suradi selaku personel Satpol PP dalam pengawasan disiplin ASN di Kecamatan Lapri Kabupaten Bone

Wawancara bersama Junaedi selaku mantan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Wawancara bersama A.Asrul Syam, selaku Analis Kinerja BKPSDM Kabupaten Bone

Wawancara bersama Rismawaty, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Bone

Sumber Internet

BataraMedia,2025. *Pj Bupati Bone Keluarkan Surat Edaran Nomor 276 Tahun 2025 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.* BataraMediaOnline. Edisi 4 Februari 2025. https://bataramedia.id/pj-bupati-bone-keluarkan-surat-edaran-nomor-276-tahun-2025-tentang-disiplin-aparatur-sipil-negara/

BontangPost, 2025*, DPRD Bontang Minta Satpol PP Tindak Tegas ASN yang Nongkrong saat Jam Kerja*, Bontangpost, Edisi 28 Juli 2025,https://bontangpost.id/dprd-bontang-minta-satpol-pp-tindak-tegas-asn-yang-nongkrong-saat-jam-kerja/

M. Agus Yozami, 2021, *Menteri PANRB Terb8tkan SE Penegakan Disiplin ASN Begini Isinya,*HukumOnline.com. Edisi 20 Januari 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-panrb-terbitkan-se-penegakan-disiplin-asn--begini-isinya-lt6007cd52cf179?page=3&_gl=1*ybcrl9*_up*MQ..*_ga*MjEwMjI3NjkwMy4xNzYyNjAzMDYx*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjI2MDMwNjEkbzEkZzEkdDE3NjI2MDM2NDUkajYwJGwwJGgw

Prayogo Laksono, 2021, *Sahnya Surat Edaran Pejabat Pemerintahan (Bupati) Ditinjau dari Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis,* BidikNasional.com, Edisi 19 Mei 2021,https://bidiknasional.com/2021/05/19/sahnya-surat-edaran-pejabat-pemerintah-bupati-ditinjau-dari-aspek-yuridis-filosofis-dan-sosiologis/

Rezi Azwar, 2023, Kasatpol PP Padang Ingatkan Petugas BKO Bekerja Efektif, Jangan Cuma Ambil ABsen di Kantor Camat,TribunPadang, Edisi 9 Januari 2023, https://padang.tribunnews.com/2023/01/09/kasatpol-pp-padang-ingatkan-petugas-bko-bekerja-efektif-jangan-cuma-ambil-absen-di-kantor-camat

SiaranPers, 2019, *Surat Edaran Tidak DIkualifikasikan Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,* SPNews, Edisi 23 November 2019, https://spn.or.id/surat-edaran-tidak-dikualifikasikan-sebagai-peraturan-perundang-undangan/

Tasrifinoor, 2021, Akan Ada Sanksi Jika ASN Tidak Disiplin, Kaltengtoday.com, Edisi 26 februari 2021, https://kaltengtoday.com/akan-ada-sanksi-jika-asn-tidak-disiplin/

Teraskata, 2025, Satpol PP Kutim Tegaskan Tak Punya Kewenangan Langsung Tindak ASN Indisipliner, TerasKata, edisi 15 November 2025, https://kaltim.teraskata.com/advertorial/satpol-pp-kutim-tegaskan-tak-punya-kewenangan-langsung-tindak-asn-indisipliner/